ANALISIS JARINGAN AKTOR DALAM PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS ANTARA PEMERINTAH KOTA DENPASAR DAN KELOMPOK KERJA DI KOTA DENPASAR

Ni Made Shinta Narayani[1], Dewa Ketut Suryawan[2], Ni Wayan Ditha Sasmitha[3]

[1,2,3]*Universitas Warmadewa*
E-mail : [1]shintanarayani19@gmail.com, [2]dksuryawan@gmail.com, [3]sasmi.ditha@gmail.com

ABSTRAK

Program Kampung Keluarga Berkualitas bertujuan meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui pendekatan lintas sektor dan berbasis wilayah, yang keberhasilannya dipengaruhi oleh keterlibatan dan hubungan antaraktor. Penelitian ini bertujuan menganalisis jaringan aktor dan koordinasi dalam pelaksanaan Program ini antara Pemerintah Kota Denpasar dan Kelompok Kerja. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan perspektif *Actor-Network Theory* (ANT) yang mencakup konsep *actor/actant, translation, Obligatory Passage Point*, serta stabilitas dan ketidakstabilan jaringan, serta didukung konsep koordinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan aktor dalam pelaksanaan program berjalan relatif stabil tanpa konflik terbuka. Proses translation dilakukan melalui pengikatan aktor secara formal, sementara keterlibatan aktor tetap terjaga karena adanya nilai sosial budaya lokal berupa "ngayah". Koordinasi antara Pokja dan dinas telah berlangsung secara formal meskipun masih menghadapi beberapa kendala komunikasi. Secara keseluruhan, pelaksanaan program didukung oleh kekuatan jaringan aktor dan komitmen aktor lokal.

Kata Kunci : *Jaringan Aktor, Koordinasi, Kampung Keluarga Berkualitas*

ABSTRACT

The Quality Family Village Program aims to improve the quality of life of families through a cross-sectoral and area-based approach, the success of which is influenced by the involvement and relationships between actors. This study aims to analyze the actor network and coordination in the implementation of this program between the Denpasar City Government and the Working Group. The study used a descriptive qualitative approach, with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. Data analysis was conducted using the Actor-Network Theory (ANT) perspective, encompassing the concepts of actor/actant, translation, Obligatory Passage Points, and network stability and instability, supported by the concept of coordination. The results show that the actor network in program implementation is relatively stable without open conflict. The translation process is carried out through formal actor engagement, while actor involvement is maintained due to the local socio-cultural value of "ngayah." Coordination between the Working Group and the agency has been formalized, although some communication challenges remain. Overall, program implementation is supported by the strength of the actor network and the commitment of local actors.

Keywords : *Actor network, coordination, Quality Family Village.*

PENDAHULUAN

Keberhasilan kebijakan publik tidak hanya bergantung pada perencanaan dan substansi kebijakan, tetapi juga pada hubungan dan koordinasi antaraktor, baik manusia maupun non-manusia, dalam jaringan dinamis yang terbentuk (Venturini, 2022). Di Indonesia, masalah umum dalam implementasi kebijakan adalah lemahnya koordinasi antaraktor, yang menyebabkan kesenjangan antara perumusan dan pelaksanaan kebijakan, misalnya dalam pengendalian penduduk. Koordinasi penting untuk menyelaraskan kegiatan, kewenangan, dan sumber daya, serta menciptakan keterpaduan tindakan antaraktor.

Overpopulation menjadi contoh nyata dari lemahnya koordinasi dan keterpaduan aktor, menimbulkan dampak serius seperti stunting, kriminalitas, dan penurunan kualitas sumber daya manusia (BKKBN, 2021; Kemenkes RI, 2022; Rohayati, 2021). Pemerintah membentuk BKKBN dan meluncurkan Program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) untuk meningkatkan kualitas keluarga melalui integrasi program lintas sektor di tingkat desa/kelurahan (Putri, 2019; Setkab RI, 2016; BKKBN, 2018). Meskipun Kampung KB telah diterapkan secara luas, efektivitas pelaksanaannya masih beragam karena kendala teknis dan non-teknis, termasuk keterbatasan tenaga penyuluh, anggaran, koordinasi, dan partisipasi masyarakat (Hanifah, 2024; Rohayati, 2021; Remiswal, 2021). Pemerintah kemudian memperkuat kebijakan melalui Inpres No. 3 Tahun 2022 untuk mengoptimalkan peran Pokja di desa, yang berfungsi mengoordinasikan program, memantau, dan memastikan pencapaian indikator (Kemenko PMK, 2022; BKKBN, 2023).

Di Kota Denpasar, yang memiliki karakteristik kependudukan dan sosial ekonomi kompleks, Kampung KB diterapkan di 26 desa/kelurahan. Namun, tantangan dalam koordinasi, perencanaan, dan komunikasi masih muncul, sehingga keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh capaian formal, tetapi juga oleh bagaimana jaringan aktor dibangun dan dikelola secara berkelanjutan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana jaringan aktor terbentuk dalam Program Kampung KB di Kota Denpasar dan bagaimana pola koordinasi antara Dinas DP3AP2KB Kota Denpasar dengan Pokja desa dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan program. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis berupa kontribusi pada kajian administrasi publik, khususnya dalam konteks implementasi kebijakan dan pola koordinasi kelembagaan berbasis masyarakat, serta memperkaya pemahaman penerapan *Actor Network Theory* (ANT) dalam menganalisis hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan instrumen kebijakan non-human. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi pemerintah dan Pokja Kampung KB dalam meningkatkan efektivitas koordinasi, memperkuat sinergi antaraktor, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mendorong terciptanya keluarga berkualitas serta lingkungan sosial yang lebih sejahtera di Kota Denpasar.

Program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) merupakan prioritas nasional yang digagas oleh BKKBN untuk mewujudkan keluarga Indonesia yang sejahtera melalui pembangunan keluarga terpadu di tingkat desa dan kelurahan. Pelaksanaan program ini melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah daerah, Kelompok Kerja (Pokja), perangkat desa, hingga masyarakat. Meskipun sebagian besar desa di Kota Denpasar telah mencapai klasifikasi mandiri dan berkelanjutan, efektivitas program masih sangat bergantung pada kualitas jejaring aktor dan koordinasi antar pihak terkait.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas implementasi Program Kampung KB maupun program berbasis masyarakat lain. Penelitian Laras Rahmawati dan Tina Cahya Mulyatin (2024) menyoroti implementasi kebijakan Kampung KB di Desa Langensari dengan pendekatan kualitatif deskriptif, namun tidak menganalisis pola hubungan antaraktor. Penelitian oleh Yunindyawati et al. (2022) menekankan pemetaan aktor dan jaringan hubungan dalam pembangunan pedesaan berbasis ekologi, menggunakan metode *mix method*, sehingga berbeda fokus dengan penelitian ini yang menekankan koordinasi kelembagaan di perkotaan. Wibowo dkk. (2024) menyoroti dampak Program Kampung KB terhadap kesejahteraan masyarakat secara *outcome based*, sementara penelitian ini lebih menitikberatkan pada pola koordinasi dan jejaring aktor dalam proses implementasi. Penelitian Wiwit Pura Nurmayanti et al. (2023) memfokuskan pada pemetaan faktor kesejahteraan keluarga menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian ini menekankan dinamika koordinasi dan jejaring aktor. Penelitian Rezki Feni Oktaviana et al. (2021) menggunakan *Actor Network Theory* (ANT) untuk menganalisis jejaring aktor dalam Program Kampung Iklim, namun fokusnya pada isu lingkungan dan adaptasi, bukan pembangunan keluarga.

Dari tinjauan tersebut terlihat adanya kesenjangan penelitian yang perlu diisi, yaitu analisis koordinasi kelembagaan pemerintah daerah dengan Pokja di perkotaan serta pemetaan jejaring aktor dalam konteks Program Kampung KB. Penelitian ini menggunakan *Actor Network Theory* (ANT) untuk memahami interaksi antara aktor manusia seperti DP3AP2KB, Pokja, dan masyarakat, serta aktor non-manusia seperti regulasi, sistem SIGA, dan website Kampung KB. Selain itu, konsep koordinasi digunakan untuk menilai kualitas interaksi antaraktor melalui komunikasi, kesadaran akan pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan dan komitmen, insentif, dan kontinuitas perencanaan.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran holistik mengenai pola jejaring aktor dan dinamika koordinasi yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kota Denpasar, sekaligus menjadi dasar rekomendasi untuk optimalisasi program.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Denpasar dengan fokus pada pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas yang melibatkan Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) serta Kelompok Kerja (Pokja) Kampung Keluarga Berkualitas di tingkat desa atau kelurahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jaringan aktor yang terlibat dalam implementasi program tersebut serta bagaimana proses koordinasi antaraktor dalam mendukung pelaksanaan program di tingkat masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai interaksi, peran, serta hubungan antaraktor dalam pelaksanaan program.

Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang terjadi dalam pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya

menggali secara mendalam proses interaksi, koordinasi, serta hubungan jaringan antaraktor yang terlibat dalam pelaksanaan program. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai peran masing-masing aktor serta dinamika kerja sama yang terbentuk dalam implementasi kebijakan di tingkat lokal.

Penentuan informan dalam penelitian dilakukan secara purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan keterlibatan dan pemahaman terhadap pelaksanaan program. Informan penelitian meliputi pihak pemerintah daerah seperti pejabat atau staf DP3AP2KB Kota Denpasar, pengelola atau anggota Pokja Kampung Keluarga Berkualitas, serta masyarakat yang terlibat sebagai penerima manfaat program. Informan tersebut dipilih karena dianggap memiliki informasi yang relevan dan pengalaman langsung terkait implementasi program di lapangan.

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan yang meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, dan analisis data. Tahap persiapan dilakukan dengan melakukan studi literatur serta penentuan lokasi penelitian dan informan yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya dilakukan tahap pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara dengan informan, serta pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan proses pengolahan dan analisis data untuk mengidentifikasi peran masing-masing aktor serta bentuk koordinasi yang terjadi dalam pelaksanaan program. Tahap ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai jaringan aktor yang terbentuk dalam implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kota Denpasar.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kota Denpasar menunjukkan adanya keterlibatan berbagai aktor yang saling berinteraksi dalam mendukung implementasi program di tingkat masyarakat. Program ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Denpasar melalui DP3AP2KB dengan melibatkan berbagai pihak, seperti perangkat desa, Kelompok Kerja (Pokja) Kampung Keluarga Berkualitas, kader masyarakat, serta masyarakat sebagai penerima manfaat program. Keterlibatan berbagai aktor tersebut menunjukkan adanya jaringan kerja yang terbentuk dalam proses implementasi program. Dalam konteks kebijakan publik, keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh satu aktor saja, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan dan kerja sama antaraktor yang terlibat dalam jaringan pelaksanaan program (Latour, 2005).

Dalam perspektif Actor Network Theory (ANT) yang dikembangkan oleh Michel Callon, implementasi suatu kebijakan tidak hanya melibatkan aktor utama, tetapi juga berbagai aktor lain yang memiliki peran dalam membentuk dan mempertahankan jaringan kerja yang saling terhubung (Callon, 1986). ANT menjelaskan bahwa hubungan antaraktor terbentuk melalui proses interaksi, negosiasi, dan kerja sama yang memungkinkan suatu kebijakan dapat dijalankan secara efektif dalam suatu jaringan sosial tertentu (Law, 1992). Dalam konteks Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kota Denpasar, pembentukan jaringan aktor tersebut dapat dianalisis melalui beberapa tahapan proses translation, yaitu problematisation, interessement, enrolment, dan mobilisation (Callon, 1986).



Gambar 1. Melaksanakan Wawancara Dan Pengumpulan Informasi Terkait Dengan Program Kampung Keluarga Berkualitas Bersama Dengan Kelompok Kerja (Pokja)



Gambar 2. Melaksanakan Wawancara Dan Pengumpulan Informasi Terkait Dengan Program Kampung Keluarga Berkualitas Bersama Dengan Kabid Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Penggerakkan DP3AP2KB

Pada tahap problematisation, DP3AP2KB Kota Denpasar berperan sebagai aktor utama yang mengidentifikasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kualitas kehidupan keluarga di masyarakat. Permasalahan tersebut meliputi aspek kesehatan keluarga, pendidikan, kesejahteraan ekonomi, serta ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan sosial yang berkembang di masyarakat. Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, pemerintah daerah merumuskan Program Kampung Keluarga Berkualitas sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga melalui pendekatan pembangunan keluarga yang terintegrasi di tingkat wilayah. Program ini menjadi wadah yang menghubungkan berbagai aktor

dan kepentingan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Callon, 1986).

Tahap berikutnya adalah interessement, yaitu proses ketika aktor utama berupaya menarik dan memperkuat keterlibatan aktor lain dalam jaringan program. Dalam pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kota Denpasar, upaya tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi program, pembinaan kepada Pokja Kampung Keluarga Berkualitas, serta koordinasi dengan pemerintah desa atau kelurahan. Kegiatan sosialisasi dan pembinaan tersebut bertujuan untuk membangun pemahaman bersama mengenai tujuan program serta memperjelas peran masing-masing aktor dalam pelaksanaan kegiatan. Proses ini menjadi penting karena keterlibatan aktor dalam suatu jaringan tidak hanya bergantung pada struktur organisasi, tetapi juga pada kemampuan aktor utama dalam membangun komitmen dan keterikatan antaraktor dalam jaringan kerja (Law, 1992).

Selain itu, proses interessement juga terlihat dari adanya upaya pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi masyarakat melalui berbagai kegiatan pemberdayaan keluarga dan penyuluhan yang dilakukan secara rutin. Keterlibatan masyarakat sebagai penerima manfaat program menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas. Partisipasi masyarakat tidak hanya memperkuat jaringan aktor yang terbentuk, tetapi juga mencerminkan adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan berbasis keluarga (Ndraha, 2020).

Tahap selanjutnya adalah enrolment, yaitu proses pembentukan kesepakatan dan pembagian peran antaraktor dalam jaringan yang telah terbentuk. Dalam pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kota Denpasar, pembagian peran dilakukan melalui pembentukan struktur organisasi Pokja Kampung Keluarga Berkualitas yang melibatkan berbagai unsur masyarakat dan pemerintah desa. Struktur organisasi tersebut memungkinkan adanya pembagian tugas yang jelas antara aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Dalam hal ini, DP3AP2KB Kota Denpasar berperan sebagai koordinator dan pembina program yang bertanggung jawab dalam memberikan arahan, pembinaan, serta dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan di tingkat wilayah. Pemerintah desa atau kelurahan berperan dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan program di tingkat masyarakat serta mendukung berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Pokja Kampung Keluarga Berkualitas. Sementara itu, Pokja Kampung Keluarga Berkualitas berperan sebagai pelaksana utama yang mengelola berbagai kegiatan program, seperti kegiatan penyuluhan keluarga, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta kegiatan sosial yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kehidupan keluarga. Pembagian peran yang jelas tersebut menunjukkan adanya kesepakatan antaraktor dalam menjalankan fungsi masing-masing untuk mencapai tujuan program secara bersama-sama (Callon, 1986).

Tahap terakhir dalam proses pembentukan jaringan aktor adalah mobilisation, yaitu tahap ketika para aktor yang telah tergabung dalam jaringan mulai menjalankan perannya secara aktif dalam pelaksanaan program. Dalam pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kota Denpasar, tahap ini terlihat melalui berbagai kegiatan yang dilakukan di masyarakat seperti kegiatan penyuluhan kesehatan keluarga, pelayanan kesehatan melalui kegiatan posyandu, serta berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pelaksanaan kegiatan tersebut menunjukkan adanya kerja sama antara pemerintah

daerah, pemerintah desa, Pokja, dan masyarakat dalam mendukung implementasi program di tingkat lokal.



Gambar 3. Melaksanakan Wawancara Dan Pengumpulan Informasi Bersama Dengan Masyarakat/ Keluarga Penerima Manfaat Program Kampung Keluarga Berkualitas

Keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan tersebut juga menunjukkan bahwa jaringan aktor yang terbentuk tidak hanya bersifat formal, tetapi juga didukung oleh nilai-nilai sosial dan budaya lokal yang mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan program tidak hanya dipengaruhi oleh struktur organisasi, tetapi juga oleh hubungan sosial dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat (Latour, 2005).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kota Denpasar berjalan relatif stabil tanpa adanya konflik yang signifikan antaraktor. Stabilitas jaringan aktor tersebut dipengaruhi oleh adanya koordinasi yang cukup baik antara pemerintah daerah, pemerintah desa, Pokja, dan masyarakat dalam pelaksanaan program. Koordinasi yang efektif memungkinkan setiap aktor dapat menjalankan perannya secara optimal serta mendukung keberlangsungan program dalam jangka panjang (Ndraha, 2020).

Secara keseluruhan, implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kota Denpasar menunjukkan bahwa pembentukan jaringan aktor yang kuat dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan program pembangunan keluarga. Melalui koordinasi yang baik, komunikasi yang efektif, serta pembagian peran yang jelas antaraktor, program dapat berjalan secara lebih terstruktur dan mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, pendekatan jaringan aktor dalam analisis kebijakan publik dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika hubungan antaraktor dalam pelaksanaan program pembangunan berbasis masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, jaringan aktor dalam Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kota Denpasar terbentuk secara terstruktur, dengan Dinas DP3AP2KB sebagai aktor kunci yang mengendalikan jalur koordinasi melalui mekanisme formal sebagai obligatory passage point. Proses translation mencakup pembentukan kesepahaman, pembagian peran, dan penguatan relasi antara pemerintah kota dan Pokja di tingkat desa. Jaringan ini cenderung stabil karena didukung legitimasi kelembagaan, regulasi, dan komitmen aktor, meskipun stabilitasnya masih bersifat administratif dan fungsional.

Pola koordinasi antara DP3AP2KB dan Pokja desa menunjukkan karakter formal struktural *top down* yang dipadukan dengan praktik partisipatif di lapangan. Koordinasi dilakukan melalui komunikasi rutin, pembinaan, monitoring, dan perencanaan berkelanjutan. Efektivitas koordinasi dipengaruhi kualitas komunikasi dua arah, kompetensi partisipan, dan dinamika relasi antaraktor, sehingga penguatan koordinasi kolaboratif dan adaptif menjadi kunci untuk menjaga stabilitas jaringan dan keberlanjutan pelaksanaan program.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Denpasar yang telah memberikan kesempatan serta data yang diperlukan dalam proses penelitian. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah desa/kelurahan, Kelompok Kerja (Pokja) Kampung Keluarga Berkualitas, serta seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi penyusunan penelitian ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan pihak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Warmadewa atas bimbingan, arahan, serta dukungan yang diberikan selama proses penyusunan artikel jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

Br. Amruddin, S. M. (2022). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF* (Vol. (M. P. D. F. Sukmawati (ed.); I)). Pradina Pustaka.

Callon, M. (1986). *Some Elements of a Sociology of Translation: Domestication of the Scallops and the Fishermen of St. Brieuc Bay. In J. Law (Ed.), Power, Action and Belief: A New Sociology of Knowledge.* London: Routledge & Kegan Paul.

Hasibuan, M. (2019). *MANAJEMEN: Dasar, Pengertian, dan Masalah.* Bumi Aksara.

Latour, B. (2005). *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory.* Oxford: Oxford University Press.

Law, J. (1992). *Notes on the Theory of the Actor-Network: Ordering, Strategy, and Heterogeneity* (Vol. 5(4)). Systems Practice. Retrieved from https://doi.org/10.1007/BF01059830

Ndraha, T. (2020). *Ilmu Pemerintahan Baru (Edisi Revisi).* Jakarta: Rineka Cipta.

Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif.* Bandung: Pustaka Ramadhan.

Sodik, S. S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Alfabeta, cv.
Wijaya, U. H. (2020). *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan.* Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
Christina Irene Dwi Handoyo, D. C. (2023). Upaya Pengingkatan Pemahaman Pola Asuh Pada Ibu Muda Di Lingkungan Rptra X. *Jurnal Serina Abdimas*, 1318-1321.
Cresswell, K. S. (2023). Actor-Network Theory and Digital Public Administration: Understanding Sociotechnical Change. *Public Administration Review, 83(1)*, 112–126.
Hanifah, L. (2024). Optimalisasi Peran Pokja dalam Pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas. *Jurnal Administrasi Publik, 12 (1)*, 45-58.
Hidayat, A. R. (2021). Efektivitas Program Kampung KB dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga. *Jurnal Kebijakan Publik, 9 (2)*, 101-115.
Nugroho, S. A. (2019). Koordinasi Antar Stakeholders dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, 11(1)*, 45–56.
Putri, D. A. (2019). Kampung KB Sebagai Strategi Pembangunan Keluarga di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 8(1)*, 23-24.
Rahmawati, L. &. (2024). Implementasi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berkualitas Menuju Terwujudnya Keluarga Berkualitas (Studi Kasus pada Kampung KB Rampak Polah Desa Langensari). *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 9(1)*, 18-28.
Rejeki, R. (2020). Pemanfaatan media pembelajaran pada pembelajaran tematik terpadu di sekolah dasar. *Jurnal basicedu, 4(2)*, 337-343.
Remiswal, R. N. (2021). Implementasi Program Kampung KB dalam Pembangunan Keluarga. *Jurnal Pembangunan Sosial, 6 (2)*, 145-158.
Rezki Feni Oktaviana, Edison, Ramadhani Setiawan. (2021). Analisis Jejaring Aktor dalam program Kampung Iklim kelurahan bukit cermin Kota tanjungpinang.
Rohayati, R. Z. (2021). Tantangan Pelaksanaan Program Kampung KB di Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Negara, 5(1)*, 66-78.
Sari, R. &. (2023). Koordinasi Lintas Sektor dalam Implementasi Program Pembangunan Berbasis Komunitas. *Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi Negara, 14(2)*, 120–132.
Venturini, T. J. (2022). Actor-Network Theory Today: Mapping Socio-Technical Controversies. *Social Studies of Science, 52(4)*, 521–540.
Wibowo, A. P., Listyaningsih, U., Mulyani, W. P., & Pitoyo, A. J. (2024). Program Kampung Keluarga Berkualitas (KKB) dalam Meningkatkan Kesejahteraan. *12(2)*, 210–217.
Wiwit Pura Nurmayanti, Sausan Nisrina, Izzu Syifa'ian Alpain, Hadi Fathurrohman, & Baiq Delima Septiani. (2023). Pemetaan Faktor Kesejahteraan Keluarga Pada Kampung Keluarga Berkualitas Di Desa Rempung: Analisis Multidimensional Scalling. *Jurnal Keluarga Berencana, 8(2)*, 87–94. Retrieved from https://doi.org/10.37306/kkb.v8i2.134
Yunindyawati, T. A. (2022). Pemetaan Aktor dan Jaringan Hubungan Antar Aktor dalam Pembangunan Pedesaan. *Jurnal Pembangunan Sosial, 10 (1)*, 25–39.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2018). *Petunjuk Teknis Kampung KB.* Jakarta: BKKBN.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2020). *Laporan kinerja BKKBN tahun*

2020. Jakarta: BKKBN.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2021). *Rencana Strategis BKKBN 2020-2024.* Jakarta: BKKBN.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2023). *Pedoman Pelaksanaaan Kampung Keluarga Berkualitas.* Jakarta: BKKBN.

DP3AP2KB Kota Denpasar. (2024). *Laporan Perkembangan Kampung Keluarga Berkualitas Kota Denpasar*. Denpasar: DP3AP2KB.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Laporan Situasi Balita Stunting di Indonesia Tahun 2022*. Jakarta: Kemenkes RI.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2022). *Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan Penguatan Kampung KB.* Jakarta: Kemenko PMK.

Kemenko PMK, K. K. (2023). *Laporan Nasional Implementasi Kampung Keluarga Berkualitas.* Jakarta: Kemenko PMK.

Setkab RI. (2016). *Nawacita: Agenda Prioritas Pembangunan.* Jakarta: Setkab RI.

Antaranews Bali. (2023). *BKKBN sebut Kampung KB sudah terbentuk di 152 desa di Bali.* Bali: Antara News. Retrieved from https://bali.antaranews.com/berita/318519/bkkbn-sebut-kampung-kb-sudah-terbentuk-di-152-desa-di-bali

DP3AP2KB Kota Denpasar. (2023). *Launching Kampung Keluarga Berkualitas se- Kota Denpasar*. Denpasar. Retrieved from https://www.kb.denpasarkota.go.id/berita/launching-kampung-keluarga-berkualitas-kampung-kb-se-kota-denpasar

Sistem Informasi Kampung KB. (2025). *Data Perkembangan Kampung KB Kota Denpasar*. Denpasar. Retrieved from http://kampungkb.bkkbn.go.id

Sistem Informasi Keluarga. (2025). *Laporan Input Data SIGA BKKBN*. Retrieved from http://siga.bkkbn.go.id